

Kesiapan Kabupaten dalam Menyambut Pasar Global



INFO BRIEF

Kesiapan Kabupaten dalam Menyambut Pasar Global



Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL)

adalah asosiasi pemerintah kabupaten yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah kabupaten demi mewujudkan pembangunan lestari yang menjaga lingkungan dan menyejahterakan masyarakat lewat gotong royong. LTKL merupakan kaukus pembangunan lestari dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI) yang berdiri sejak bulan Juli 2017.

Informasi yang tertuang dalam dokumen ini berdasarkan analisa dari laporan kemajuan kabupaten anggota LTKL, Rapat Jejaring Mitra Utama LTKL dan diskusi terbatas bersama Kabupaten Anggota LTKL dari bulan Juli hingga November 2023

Latar Belakang

Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) adalah asosiasi pemerintah kabupaten yang telah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menunjukkan model dan cerita sukses terkait ekonomi lestari dalam memastikan transisi menuju pembangunan berkelanjutan dan mendorong inovasi berbasis alam selama lima tahun terakhir.

Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan perkebunan kelapa sawit, karet, dan kopi memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun masih ada tantangan seperti deforestasi, degradasi lahan, konflik dengan masyarakat adat, dan krisis lingkungan. Program Lingkungan Persatuan Bangsa-Bangsa (UNEP) mencatat sejak tahun 1990, sekitar 420 juta hektar hutan di seluruh dunia hilang akibat konversi hutan, dan Indonesia mengalami deforestasi signifikan dengan kehilangan 2,1 juta hektar dari tahun 2015 hingga 2020¹. Dampaknya dirasakan oleh masyarakat lokal yang sangat bergantung pada sumber daya hutan.

Saat ini, industri kelapa sawit masih memainkan peran penting bagi ekonomi Indonesia dan menyerap jutaan tenaga kerja. Artinya, transisi menuju ekonomi alternatif melalui inovasi berbasis alam untuk mendorong keberlanjutan di tingkat kabupaten perlu dilakukan guna memajukan agenda prioritas nasional, yakni melindungi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjembatani antara implementasi produksi kelapa sawit berkelanjutan agar dapat diterima di pasar global dan secara paralel mempertemukan konektivitas dengan alternatif ekonomi lainnya melalui inovasi berbasis alam.

Tahun 2022, UNEP melaporkan bahwa 83% dari investasi tahunan sebesar USD 154 miliar dalam solusi berbasis alam berasal dari pendanaan publik. Artinya belum banyak investasi yang masuk untuk solusi berbasis alam, karena kelapa sawit masih menjadi sektor kunci dalam ekonomi nasional. Kesenjangan investasi untuk solusi berbasis alam di tingkat kabupaten masih ditemukan dan masih sangat sedikit contoh manfaat dan/atau insentif bagi yurisdiksi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Untuk mengatasinya, LTKL membantu anggotanya di tingkat kabupaten dalam mengembangkan model ekonomi berkelanjutan bagi masyarakatnya agar tidak bergantung pada bisnis konvensional dan sektor perkebunan besar yang memiliki dampak negatif pada lingkungan.

LTKL juga menggunakan strategi tata kelola multi-pihak di tingkat kabupaten sebagai strategi kolaborasi pemangku kepentingan. Tujuannya untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah yang didorong oleh aksi kolektif antara pemerintah daerah, perusahaan, LSM, akademisi, kelompok petani, peneliti, donor, dan filantropis. Semua itu guna mendukung potensi yang berkembang dari inovasi berbasis alam serta mendorong implementasi perkebunan berkelanjutan. Hubungan antara bisnis konvensional dan inovasi berbasis alam bersumber dari potensi keduanya. Sinergi ini diperlukan, terutama dalam kerangka mendorong investasi berkelanjutan. Upaya ini memerlukan kerjasama antara pembuat kebijakan, investor, perusahaan, petani kecil, dan masyarakat sipil. Inisiatif ini diharapkan dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia.

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2023. STATUS LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA 2022. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia

Kesiapan Kabupaten Anggota LTKL



Berdasarkan data Kementerian Perdagangan tahun 2022, total ekspor Indonesia ke Eropa mencapai USD 21,5 miliar, atau 19 persen dari total ekspor Indonesia ke pasar global, dimana sawit, karet, kakao dan kopi merupakan empat komoditas utama yang paling diminati negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India dan beberapa negara Eropa. Namun, selama hampir satu dekade (2011-2020), menurut data KLHK, laju deforestasi hutan alam di 9 kabupaten yang disebabkan oleh produksi komoditas konvensional tercatat mencapai 40.901 hektar per tahun². Hal ini

tentu menjadi tantangan besar untuk memasuki pasar global yang mensyaratkan produksi komoditas yang bebas deforestasi. Salah satu upaya efektif yang dapat dilakukan untuk meredam laju deforestasi yang disebabkan oleh produksi komoditas konvensional adalah mendorong aksi-aksi berkelanjutan dari sisi kebijakan, perencanaan, tata kelola kelembagaan hingga skema data dan secara bersamaan kabupaten dapat menemukan alternatif inovasi basis alam lainnya yang memiliki potensi pasar, seperti agroforestri, bambu, kelapa, hingga rempah.

² Diolah dari data spasial deforestasi tahunan yang didapatkan dari: <https://geoportal.menlhk.go.id/server/rest/services>

Peta Sebaran Total Produksi Komoditas Berbasis Alam dan Komoditas Konvensional di 9 Kabupaten Anggota LTKL tahun 2022-2023



*Satuan dalam Ton
 Sumber Data : Kabupaten Dalam Angka, BPS, 2023

Berdasarkan Peta Sebaran Total Produksi Komoditas Berbasis Alam dan Komoditas Konvensional tahun 2022-2023 di atas, total produksi masih didominasi oleh komoditas konvensional seperti kopi, kakao, dan sawit. Di sisi lain, terdapat komoditas berbasis alam yang cukup bervariasi terdiri dari kelapa, tebu, sagu, lada, aren, cengkeh, kemiri, pinang, gambir, dan kapuk. Perbedaan total produksi yang signifikan antara komoditas konvensional dan komoditas berbasis alam menyiratkan bahwa perhatian pasar domestik maupun global terhadap komoditas berbasis alam rendah, sehingga potensi ini dapat terus dikembangkan.

LTKL bersama para kabupaten dan mitra pembangunan berupaya untuk mengembangkan kesiapan kabupaten dalam membangun sebuah 'resep' transformasi yurisdiksi berkelanjutan melalui implementasi dan pendampingan bagi para kabupaten anggota dalam proses sistematis secara berkelanjutan melalui tindakan kolektif dengan pemangku kepentingan yang tepat. 'Resep' ini mencakup 5 pilar esensial, yang dapat dijadikan tolak ukur kesiapan kabupaten antara lain (i) perencanaan, (ii) kebijakan & regulasi, (iii) tata kelola multi-pihak, (iv) aksi bersama (Inovasi & Investasi), dan (v) pemantauan, pelaporan, dan komunikasi.

Tabel: 5 Pilar Esensial Kabupaten LTKL³

	Inovasi Perencanaan ⁴	Inovasi Kebijakan dan Regulasi	Tata Kelola Multi Pihak	Aksi Bersama (Inovasi & Investasi)	Pemantauan, Pelaporan, Komunikasi
Aceh Tamiang	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi Kawasan Ekosistem Leuser ke dalam RTRW Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang terintegrasi dengan Panduan Investasi Lestari 	Rencana Aksi Daerah- Kelapa Sawit Berkelanjutan ⁵	Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL) yang berfungsi sebagai forum multi pihak untuk mendukung pencapaian target yurisdiksi penghasil komoditi berkelanjutan	Inovasi dan Investasi sawit berkelanjutan sebagai model kolektif	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan untuk deforestasi yang dilakukan secara kolaboratif oleh KPH, pemerintah kabupaten, lembaga masyarakat sipil yang difasilitasi oleh kelembagaan multipihak Telah terintegrasi dengan <i>SourceUp</i>
Siak	<ul style="list-style-type: none"> RTRW yang sudah meliputi rencana pengembangan pertanian dan perkebunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan pelarangan aktivitas pembukaan lahan dengan pembakaran Integrasi perencanaan pembangunan melalui RPJMD 2020-2024 berbasis berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Perda Siak Hijau - menanam komoditas ramah gambut Implementasi TAKE berbasis dimensi lingkungan, ekonomi, dan Indeks Desa Membangun (IDM) Rencana Aksi Daerah - Kelapa Sawit Berkelanjutan 	Tim Koordinasi Siak Kabupaten Hijau (TKSKH) berfungsi sebagai wadah gotong-royong multipihak untuk akselerasi target Siak Hijau	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan model bisnis & produk alternatif melalui PT Alam Siak Lestari sebagai Sentra Produksi Lestari Pengembangan UMKM melalui inkubasi - Skelas yang telah memiliki badan hukum Penyusunan <i>Investment Outlook</i> yang berbasis Multipihak - Prospek Investasi Yurisdiksi melalui potensi komoditas perkebunan dan inovasi basis alam 	Implementasi KDSD - dalam tahap pengumpulan data multipihak dan telah melaporkan kemajuan berkelanjutan melalui CDP <i>State & Regions Questionnaire</i>

3 Kemajuan lima pilar kabupaten ini berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Kabupaten Anggota LTKL yang difasilitasi oleh Sekretariat LTKL
 4 Seluruh kabupaten anggota LTKL (9) sedang berproses untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) 2025-2045
 5 Masih dalam tahap penyelesaian

	Inovasi Perencanaan ⁴	Inovasi Kebijakan dan Regulasi	Tata Kelola Multi Pihak	Aksi Bersama (Inovasi & Investasi)	Pemantauan, Pelaporan, Komunikasi
Musi Banyuwasin	RTRW sudah melarang perkebunan di kawasan hutan dan sudah ada identifikasi daerah rawan kebakaran hutan	<ul style="list-style-type: none"> Dana Insentif berbasis Kinerja MuBa Hijau berdasarkan Perbup 8/2022 Peraturan Daerah MuBa Hijau 	Pusat Unggulan Komoditas Lestari (PUKL) - mendekati kerjasama multipihak dalam Target Pengelolaan Sumber Komoditi Terverifikasi (MASKOT Muba) yang berdampak peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pengembangan UMKM melalui inkubasi - Sellaras	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan petani sawit⁶ Satu Data MuBa Geoportal Satu Peta MuBa Implementasi KDSD - Telah menerbitkan Profil Yurisdiksi yang merangkul kemajuan berkelanjutan dalam rangka mendukung MuBa Hijau Telah terintegrasi dengan <i>SourceUp</i>
Sintang	<ul style="list-style-type: none"> RPPLH sebagai dokumen perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup RUPM sebagai dokumen perencanaan penanaman modal yang dapat menjadi basis investasi pada sektor keberlanjutan <i>Integrasi perencanaan pembangunan melalui RPJMD 2020-2024 berbasis berkelanjutan</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Perbup 122/2021 - Pengusulan dan Penetapan Pengelolaan Rimba/Gupung untuk perlindungan hutan di wilayah APL RAD KSB Perda Masyarakat Hukum Adat 12/2015 	Sekretariat Bersama PSDA - yang memiliki inisiasi gotong-royong dalam pencapaian target bersama menuju Sintang Lestari	Pengembangan UMKM melalui inkubasi - Gemilang yang telah memiliki badan hukum	<ul style="list-style-type: none"> WebGIS perkebunan Sintang yg dikelola multipihak melalui TPD Sintang Implementasi KDSD - Telah menerbitkan Profil Yurisdiksi yang memperlihatkan inisiatif gotong-royong Sintang Lestari Pilot Yurisdiksi untuk LandScale mengukur keberlanjutan yurisdiksi berbasis pasar
Sanggau	<i>Integrasi perencanaan pembangunan melalui RPJMD 2020-2024 berbasis berkelanjutan</i>	<ul style="list-style-type: none"> RAD KSB Implementasi TAKE berbasis dimensi lingkungan, ekonomi, dan Indeks Desa Membangun (IDM) Perda 1/2017 tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat 	Sabang Merah Berdempu (SMB) sebagai kelembagaan multipihak	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan UMKM melalui inkubasi - Samudra Aksi bersama antara PKS dan Petani bersama Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk mendorong sawit berkelanjutan 	
Kapas Hulu		<i>Inovasi kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola lahan masih dalam tahap berproses</i>	Kelembagaan Multipihak untuk Pembangunan Berkelanjutan dengan basis Cagar Biosfer Betung Kerihun Danau Sentarum	Pengembangan inovasi dan investasi berbasis kerarifan lokal, seperti tengkawang	Dalam tahap sinkronisasi dengan <i>LandScale</i> dan KDSD
Gorontalo			Kelompok Kerja Perubahan Iklim	Pengembangan investasi kelapa berkelanjutan	Implementasi KDSD - Telah menerbitkan Profil Yurisdiksi
Bone Bolango			[belum berproses]	[belum berproses]	Implementasi KDSD - dalam tahap proses pengumpulan data multipihak

6 NB : (*) masih dalam proses

	Inovasi Perencanaan ⁴	Inovasi Kebijakan dan Regulasi	Tata Kelola Multi Pihak	Aksi Bersama (Inovasi & Investasi)	Pemantauan, Pelaporan, Komunikasi
Sigi	<ul style="list-style-type: none"> RTRW sudah mencakup adanya perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan untuk wilayah yang sudah menjadi lahan perkebunan RUPM sebagai perencanaan investasi di kabupaten telah terintegrasi dengan riset pasar domestik yang telah dilakukan Integrasi perencanaan pembangunan melalui RPJMD 2020-2024 berbasis berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Perda Sigi Hijau - pemanfaatan ruang & wilayah dengan prinsip berkelanjutan Implementasi TAKE berbasis dimensi lingkungan, ekonomi, dan Indeks Desa Membangun (IDM) 	Kelembagaan Multipihak Sigi Hijau	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan UMKM melalui inkubasi - Gampiri Pengembangan Aksi Bersama untuk Investasi Basis Alam dan bernilai tambah dari Komoditas Kakao, Kopi, Bambu, dan Vanili 	<ul style="list-style-type: none"> Satu Data Sigi Implementasi KDSD - Telah menerbitkan Profil Yurisdiksi dan telah melaporkan kemajuan berkelanjutan melalui CDP State & Regions Questionnaire

Berdasarkan perkembangan masing-masing kabupaten dari lima pilar esensial tersebut, pemerintah kabupaten bersama dengan mitra pembangunan telah bergotong-royong membangun kesiapan untuk menghadapi pasar global. Namun dalam perjalanannya, masih terdapat tantangan dan memerlukan bantuan untuk melengkapi pilar-pilar yang lain agar dapat saling memperkuat modalitas.

Misalnya, melalui kolaborasi secara gotong-royong lewat kelembagaan multipihak untuk melakukan pemantauan dan pelaporan serta mendorong inovasi yang diperkuat dengan dokumen perencanaan daerah dan regulasi terkait. Tidak hanya dapat diinisiasi oleh pemerintah kabupaten maupun mitra pembangunan, tapi juga sektor swasta juga dapat bersama-sama mendukung kontribusi pembangunan berkelanjutan.



Peluang dan Tantangan Kabupaten dalam Menghadapi Kesiapan Pasar Global



Dalam mengembangkan komoditas lestari, selain mematuhi peraturan di Indonesia, kabupaten anggota LTKL juga harus memperhatikan syarat-syarat yang diberlakukan oleh pasar global seperti beberapa prasyarat yang saat ini sedang dan telah berlaku. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi perkebunan berkelanjutan di tingkat kabupaten, karena masih terdapat kesulitan mulai dari mendapatkan data yang akurat dan terkini

mengenai ketertelusuran komoditas, masih adanya konversi hutan untuk perkebunan di dalam kawasan hutan, hingga tumpang tindih lahan petani antara kawasan hutan dan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi kabupaten anggota LTKL dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem Data Integrasi sebagai Basis Skema Penelusuran

Belum adanya sistem pelacakan data yang terintegrasi, menyebabkan kabupaten mengalami kesulitan untuk memastikan rantai pasok komoditas daerahnya memiliki penelusuran dari hulu ke hilir dan memastikan bebas deforestasi. Sistem bagi pakai data antar pihak masih menjadi tantangan besar baik dari perusahaan, mitra implementor, masyarakat sipil hingga pemerintah daerah dan perlunya mekanisme yang jelas antarpihak. Selain itu, pentingnya untuk proses memastikan pengarusutamaan indikator antara kebutuhan pasar dan ketersediaan data yang dimiliki oleh kabupaten, dan hal ini

menjadi faktor utama ketidaksinkronan inisiatif khususnya terkait sistem data.

Saat ini, Kabupaten anggota LTKL memiliki Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD) yang digunakan sebagai basis untuk tata kelola data multipihak dan bisa menjadi pintu masuk untuk sinkronisasi antara data di kabupaten dengan nasional. Melalui proses ini, harapannya konektivitas antar platform nasional dan global dapat dijadikan 'benchmark' dan dijadikan 'pintu masuk' untuk mendorong tata kelola data yang efektif agar data dapat dibagi pakaikan secara optimal dan bijak.

2. Penguatan Konektivitas Kebijakan dan Perencanaan antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Sinkronisasi regulasi tentang tata kelola lahan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten masih menjadi tantangan, khususnya untuk sektor perkebunan, seperti beberapa regulasi terkait mandat kabupaten hingga tata kelola lahan khususnya fungsi untuk perlindungan hutan. Terkait dengan beberapa perkembangan terkini terkait regulasi pasar global, perlunya sinkronisasi dan penyederhanaan mekanisme untuk implementasi tata kelola lahan berkelanjutan dari aspek kebijakan hingga perencanaan, seperti revisi Penilaian Usaha Perkebunan (PUP), skema insentif publik yang dapat diakses berbasis kinerja untuk perbaikan tata kelola lahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hijau yang mampu mengurangi laju deforestasi secara efektif dan tegas dalam mewujudkan nol-deforestasi, serta upaya sinkronisasi melalui rencana pembangunan daerah, salah satunya melalui momentum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun kedepan (2025-2045).

Selain itu, keberadaan tutupan hutan di dalam Area Penggunaan Lain (APL) perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih kuat karena ada kerentanan konversi lahan dibandingkan dengan hutan yang ada di kawasan hutan. Tutupan hutan di dalam APL ini perlu dilindungi karena memiliki potensi nilai konservasi tinggi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, seperti perlindungan erosi dan longsor, penyediaan produk hutan non-kayu dan memiliki nilai kultural atau budaya. Beberapa hal yang perlu didorong adalah adanya sinkronisasi area antara hutan dengan nilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV) atau High Carbon Stock/HCS dengan APL yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu penguatan tata kelola hutan di APL oleh masyarakat lokal atau masyarakat adat juga perlu dilakukan yang didukung oleh pemerintah daerah sebagai alternatif inovasi basis alam.

3. Kesiapan dan Kapasitas Petani dan Perusahaan Kecil-Menengah di Kabupaten

Saat ini, penting untuk memastikan kapasitas dan modalitas petani dan perusahaan kecil- menengah yang membutuhkan dukungan agar transformasi menuju tata kelola perkebunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik, baik dari sisi legalitas hingga kapasitas untuk memastikan komitmen *No Deforestation, No Peat Exploitation* khususnya untuk perusahaan kecil-menengah. Selain itu, penting adanya pendampingan yang

cukup intens untuk petani untuk berbagai komoditas dalam memastikan berbagai faktor yang dibutuhkan untuk menuju transformasi keberlanjutan. Disisi lain, khusus untuk perusahaan kecil-menengah, hampir 50 perusahaan kecil-menengah di Kalimantan Barat dan Aceh yang mengikuti Klinik Implementasi Rantai Pasok Berkelanjutan dari berbagai komoditas, dan yang paling besar berasal dari perusahaan sawit.

4. Penguatan 'Mesin Penggerak' Kabupaten melalui Tata Kelembagaan Multipihak

Kondisi terkini di kabupaten adalah banyaknya inisiatif yang saat ini berjalan di suatu yurisdiksi atau lanskap, namun sering terjadi tumpang tindih dan konflik antar inisiatif. Mendasari hal tersebut, beberapa kabupaten anggota LTKL mendorong kelembagaan multipihak sebagai 'mesin penggerak' di kabupaten sebagai 'perangkai gotong royong' untuk para pemangku kepentingan di yurisdiksi.

Tantangan yang terjadi saat ini, kurangnya sumber daya manusia (SDM) lokal yang berdaya untuk menjalankan fungsi tersebut, sehingga perlu diperkuat dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan dari sisi pengembangan kapasitas hingga memastikan kemandirian entitas dari kelembagaan multipihak tersebut.

5. Membuka Peluang Insentif Publik dan Non-Publik berbasis kinerja untuk Kabupaten

Penting adanya insentif basis kinerja berbasis lima pilar yang dijadikan sebagai resep pembangunan lestari, insentif tersebut bisa bersifat publik yang berasal dari anggaran pemerintah nasional seperti Dana Insentif Daerah (DID) atau sejenisnya dan non-publik, seperti transaksi, investasi, rekognisi, hingga jejaring. Untuk mencapai kabupaten lestari, penting adanya insentif yang perlu didefinisikan lebih nyata dan memiliki progres baik dari sisi kinerja dan insentif yang didapatkan.

Berbagai inisiatif yang telah dimulai di kabupaten anggota LTKL bukan hanya sebagai langkah proaktif untuk memastikan komoditas kabupaten memenuhi standar yang ada, standar perdagangan global, tetapi juga sebagai upaya untuk mendorong dampak yang lebih luas untuk perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi multi-pihak dapat dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa mitra LTKL sebagai berikut:

INISIATIF MITRA PEMBANGUNAN⁷

Mendukung Status Legalitas Perkebunan	Mendukung Perkebunan Lestari Tanpa Deforestasi	Mendukung Kebijakan Kabupaten Lestari
<p>SPKS MoU dengan Kementerian ATR/BPN untuk pemetaan petani swadaya</p> <p>MADANI Pemetaan dan Pendataan Sawit dan Komoditas Lainnya dalam Rangka Akselerasi STDB di Kapuas Hulu</p> <p>IDH,FKL & PUPL Memperkuat upaya penerbitan STDB di Aceh Tamiang</p> <p>WARI & SPKS Mendampingi petani swadaya di Siak</p> <p>FORTASBI, Solidaridad, Rainforest Alliance & WWF Mendorong akselerasi implementasi ISPO dan RSPO di Kapuas Hulu</p> <p>CDP Membangun kuesioner corporate untuk meningkatkan keterelusuran</p> <p>FKL, LTKL & WRI Indonesia Memperkuat kesiapan pelaku usaha dalam Rantai Pasok Berkelanjutan (Aceh Tamiang, Sanggau)</p>	<p>Winrock Memberikan dukungan kepada Kabupaten untuk perencanaan pembangunan Kapuas Hulu</p> <p>Daemeter Optimalisasi pemetaan dan pendataan petani swadaya yang dilanjutkan dengan penyelesaian petani di kawasan hutan dan penyelesaian petani di kawasan konservasi di Siak dan Pelalawan</p> <p>IDH, WRI, FKL, Pemkab Aceh Tamiang & KPH3 Monitoring sistem pembukaan lahan</p> <p>SPKS & GIZ Peningkatan kapasitas petani sawit swadaya di Sanggau</p> <p>GIZ Komitmen bersama Pabrik Kelapa Sawit di Sanggau</p> <p>Alam Siak Lestari, Winrock International, Elang Pengembangan model bisnis dan produk alternatif untuk melindungi hutan dan gambut di Siak</p> <p>WRI Monitoring deforestasi di Siak dan Aceh Tamiang</p>	<p>Winrock Memberikan dukungan kepada Kabupaten untuk perencanaan pembangunan Kapuas Hulu</p> <p>MADANI Peningkatan Kapasitas OPD dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan (Kaphul)</p> <p>Traction Energy Asia RPJMD berkelanjutan (Bone Bolango)</p> <p>GIZ Penilaian dan integrasi HCS dan HCV ke dalam rencana tata ruang (Kapuas Hulu)</p> <p>CSF Green Budget Tagging (Kaphul)</p> <p>KARSA Peraturan Daerah (Perda) Sigi Hijau</p> <p>LTKL, TAF & KARSA Institute Kebijakan Transfer Ekologis ke Kabupaten (TAKE) di Muba, Siak, Sigi, dan Sanggau.</p> <p>Pinus, TAF & LTKL Kebijakan Muba Hijau yang mencakup insentif berbasis kinerja</p>

⁷ Pemetaan ini dilakukan berdasarkan Peta Gotong Royong yang telah dikompilasi dan saat ini masih dalam proses penyempurnaan di seluruh kabupaten anggota

KISAH SUKSES:

SOLUSI BERBASIS ALAM UNTUK KONSERVASI LAHAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI SIGI



Konservasi, restorasi, dan pengembangan sumber daya yang berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa adanya peningkatan ekonomi. Menggunakan Inovasi Berbasis Alam untuk memilih komoditas yang memiliki nilai jual tinggi merupakan salah satu solusi yang tepat. Sebagai hasil dari Inovasi Basis Alam, fungsi lingkungan dan lanskap dapat ditingkatkan di lingkungan dan lanskap yang telah terkena dampak negatif dari praktik pertanian dan degradasi lahan, sekaligus berkontribusi pada peningkatan mata pencaharian dan fungsi sosial dan budaya lainnya. Ekosistem alami dapat dikonservasi atau direhabilitasi di bawah Inovasi Basis Alam.

Lanskap pertanian dapat memperoleh manfaat dari penerapan Inovasi Basis Alam untuk kesehatan tanah, kelembaban tanah, mitigasi karbon (melalui tanah dan kehutanan), perlindungan kualitas air hilir, manfaat keanekaragaman hayati, serta produksi pertanian dan rantai pasok, sehingga dapat mencapai dampak lingkungan nol-nol sekaligus mencapai ketahanan pangan dan air, serta memenuhi target iklim.

Kabupaten LTKL dan para pemangku kepentingan menggunakan pendekatan yurisdiksi melalui insentif untuk solusi berbasis alam. Sebagai contoh, upaya konservasi di Kabupaten Sigi menggunakan komoditas alam seperti kakao dan bambu sebagai komoditas berbasis alam untuk melestarikan dan menjaga kelestarian hutannya. Hal ini dikarenakan hampir 75 persen wilayah Sigi adalah hutan dan sisanya digunakan untuk area budidaya. Oleh karena itu, penting bagi Kabupaten Sigi untuk membuktikan

bahwa ada skema investasi yang dapat menjaga hutan dan menyejahterakan masyarakat.

Pengembangan produk hilirisasi berbasis bahan alam seperti Inovasi Basis Alam di Sigi melibatkan serangkaian proses seperti pembuatan pusat inovasi, produksi dan inkubasi, serta kolaborasi multipihak. Termasuk peran pemerintah daerah sebagai regulator dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Sigi Hijau sebagai payung utama untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan.

Komoditas Kakao

Kakao merupakan komoditas unggulan di Sigi. Pemerintah Kabupaten Sigi bersama dengan *Cocoa Sustainability Partnership (CSP)*, PisAgro dan LTKL memberikan contoh konkret melalui portofolio investasi berbasis yurisdiksi dengan menggunakan komoditas kakao. Saat ini, Sigi tengah mengembangkan komoditas kakao dari sisi hulu dan hilir.

Di sisi hulu, pendirian pusat penelitian dan pengembangan akan mengatasi kesenjangan bahan tanam bagi petani kakao dan mempromosikan metode produksi kakao yang berkelanjutan. Serta mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan lokal untuk budidaya bibit dan layanan konsultasi. Fokus penelitian dan pengembangan adalah untuk meningkatkan produktivitas dan mengembangkan praktik-praktik budidaya yang berkelanjutan.

Di sektor hilir, Sigi mengembangkan produk hilir kakao melalui kemitraan dengan badan usaha untuk menyediakan infrastruktur dan sumber daya bersama bagi produsen cokelat UMKM setempat, sehingga merangsang pertumbuhan mereka dan mengurangi ketergantungan mereka pada anggaran pemerintah.



KISAH SUKSES:

TRANSFORMASI BERKELANJUTAN DARI KOMODITAS LAIN DI SIAK

Kabupaten Siak berupaya mengurangi ketergantungannya pada komoditas kelapa sawit. Mereka memanfaatkan konsep Ekonomi Lestari untuk memaksimalkan potensi lahan gambut. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mencegah kebakaran hutan yang disebabkan oleh mengeringnya lahan gambut yang terjadi setiap tahun.



Ekonomi Lestari merupakan strategi pembangunan realistis yang bertujuan untuk memasok produk bernilai tambah dari bahan baku yang berada di dalam kawasan ekologi yang sehat di Kabupaten Siak, seperti hutan, rawa gambut, daerah aliran sungai, danau, kawasan pertanian, dan wilayah pesisir. Siak telah mengadopsi strategi yang memungkinkannya untuk mengembangkan industri perantara berbasis masyarakat yang menanggapi permintaan pasar secara berkelanjutan sambil meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah Kabupaten Siak menyadari bahwa untuk implementasi yang sukses, sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari sektor-sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pemerintah kabupaten juga berperan sebagai fasilitator dan regulator dari proses tersebut dengan mengeluarkan Perda Siak Hijau sebagai dasar hukum untuk mengimplementasikan transformasi tersebut.

Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk melindungi kawasan hutan seluas 346.551 hektar dan lahan gambut seluas 531.251 hektar di Kabupaten Siak serta meningkatkan mata pencaharian petani dan rumah tangga di daerah tersebut sebagai hasil dari upaya tersebut. Selain untuk pertanian, lahan gambut juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan lain sesuai dengan karakteristik dan ekosistemnya.

Sektor Perikanan

PT Alam Siak Lestari, misalnya, melakukan penelitian tentang potensi ikan gabus (*Channa striata*) sebagai produk turunan yang bernilai tambah. Salah satu produk yang berhasil dikembangkan adalah Albugo, ekstrak ikan gabus, tepung ikan gabus dengan kandungan protein tinggi (80%), dan pupuk organik. Berawal dari sebuah laboratorium, Alam Siak Lestari (ASL) kini telah menjadi sebuah entitas bisnis yang menggunakan model pembiayaan campuran. Pemegang sahamnya adalah BUMD Dayun Mandiri (Badan Usaha Milik Desa) dan masyarakat lokal di Siak. Laboratorium ini merupakan salah satu dari tiga sentra dalam model hilirisasi yang digagas oleh anak-anak muda di Kabupaten Siak. Melalui sentra-sentra ini, Kabupaten Siak mengembangkan model ekonomi alternatif.



Pada tahun 2022, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberikan sertifikasi terhadap produk Albugo. Pengembangan produk dari ASL juga telah mendapatkan sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang aman (CPOTB) dari BPOM. Albugo kini tersedia di hampir 100 toko apotek di Kabupaten Siak dan Pekanbaru di Provinsi Riau, Indonesia. Setiap bulannya, ASL menjual 1.500 botol senilai Rp 225 juta atau setara dengan US\$ 15.200. ASL berharap dapat menjual 2.000 hingga 3.000 botol per bulan tahun ini.



Sektor Pertanian

Sebagai bagian dari transformasi dan peralihan ke komoditas non kelapa sawit, Kelompok Tani Hutan (KTH) Desa Dayun telah menanam produk hortikultura di lahan gambut seluas 2 hektar di Kabupaten Siak, Riau. Kelompok tani ini menanam komoditas seperti cabai rawit, terong, dan kacang panjang. Selain itu, mereka juga menanam meranti, labu, sagu, matoa, dan karet sebagai diversifikasi. Meskipun menanam di lahan gambut, produktivitasnya relatif tinggi. Misalnya, terong bisa mencapai 200 kilogram dalam tiga bulan masa panen. Dalam periode yang sama, satu pohon cabai menghasilkan sekitar 8-9 ons cabai. Mengingat hampir 50 persen wilayah Kabupaten Siak merupakan lahan gambut, maka pemanfaatan lahan gambut menjadi



bagian penting dalam pertanian hortikultura di daerah tersebut. Komoditas hortikultura lebih menguntungkan daripada kelapa sawit bagi petani. Dengan menanam hortikultura, petani membuka lahan tanpa membakar dan menggunakan alat manual. Hasilnya, gambut dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Hasil produksi hortikultura yang tinggi membuat petani dapat memasarkan produknya di Pulau Jawa, termasuk Jakarta dan Kudus, Jawa Tengah.

Kolaborasi multipihak perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti masyarakat sipil, masyarakat adat, komunitas lokal, orang muda, sektor swasta termasuk UMKM dan petani. Tidak hanya terbatas pada keterlibatan pihak tertentu, namun semua pihak yang peduli dengan konservasi, restorasi, pemanfaatan hutan berkelanjutan, penanggulangan deforestasi dan degradasi hutan, serta produksi komoditas berkelanjutan. LTKL sebagai koalisi mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi pada peningkatan kemampuan kabupaten untuk mencapai visi pembangunan lestari, agar keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan dapat tercapai. Partisipasi aktif dan pemahaman dari masyarakat lokal khususnya orang muda kabupaten menjadi dasar utama untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Kolaborasi sinergis di antara semua pihak ini akan membantu menciptakan solusi berkelanjutan yang memberikan dampak positif yang menjaga lingkungan dan mensejahterakan masyarakatnya.



Mitra Kolaborator





INFO BRIEF
NOVEMBER 2023